

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



MENGUAK MAKNA SUMPAH PEMUDA di Era Millenial

Merajut Nasionalisme Yang Mulai Kusut

EDISI XIX
OKTOBER 2017

LUNTURNYA BUDAYA BANGSA

SAATNYA MENUJU KOMUNIKASI PEMERINTAH
YANG JELAS, AKURAT DAN TERPERCAYA

FENOMENA "TERNAK AKUN" PALSU



Bulan Oktober memiliki arti besar bagi bangsa Indonesia, di bulan ini ada beberapa peristiwa besar yang dimiliki bangsa Indonesia, dua diantaranya adalah lahirnya Tentara Nasional Indonesia ke-72 dan Hari Sumpah pemuda ke-89. Keduanya memang memiliki arti yang besar bagi bangsa ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah elemen penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaannya seakan tak pernah hilang dari ingatan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tentara Nasional Indonesia kita sangat berbeda dengan keberadaan tentara di negara lain. Sejarah lahirnya TNI yang benar-benar berasal dari rakyat menjadikan TNI memiliki karakter yang sangat "istimewa".

TNI bisa hadir di setiap sendi kehidupan negara ini, disamping tugas utamanya sebagai penjaga kedaulatan NKRI, TNI hadir di tengah-tengah masyarakat dan mobilisasinya sangat dirasakan di segala aktivitas mulai dari membantu masyarakat yang terkena bencana alam, menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat, membantu pembangunan di daerah terpencil dan sebagainya. Dapat dikatakan Tentara Nasional Indonesia berbeda dengan tentara negara lain, TNI kita adalah bagian utuh dari kehidupan berbangsa dan bernegara, "TNI adalah Rakyat".

Moment lain yang tidak kalah penting di bulan ini adalah Hari Sumpah Pemuda yaitu hari yang ditetapkan berdasarkan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Jika kita telaah lebih dalam, kita patut bersyukur atas sumbangsih para pemuda Indonesia yang sudah melahirkan Sumpah Pemuda. Sudah seharusnya kita meneladani langkah-langkah dan keberanian mereka hingga mampu menorehkan sejarah emas untuk bangsanya.

Menjadi bangsa yang besar merupakan cita-cita para pendiri bangsa ini, sudah seharusnya generasi sekarang ini mau belajar dari generasi sebelumnya, bahwa untuk menjaga dan merawat bangsa ini diperlukan kerja nyata dan keseriusan, tidak hanya berfikir untuk diri sendiri, akan tetapi harus sadar bahwa kita hidup berbangsa dan bernegara.

REDAKSI

Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

OPINI



- 4 Lunturnya Budaya Bangsa



- 7 Hari ini Kita Bicara Budaya:
OTT KPK Terhadap Kepala Daerah

TAJUK UTAMA



- 9 Menguak Makna Sumpah Pemuda
di Era Millennial:
Merajut Nasionalisme Yang Mulai Kusut

KEBIJAKAN PEMERINTAH



- 14 Perppu Ormas Menjadi Undang-Undang
Dibuat untuk Jaga Persatuan dan Kebhinekaan

INFO KITA



- 16 Presiden Joko Widodo:
Bela Negara Agar Diberikan dan Diperkuat
Penangannya kepada Wantannas dengan
Tidak Membentuk Organisasi Baru



- 18 Saatnya Menuju Komunikasi Pemerintah
yang Jelas, Akurat dan Terpercaya



- 20 Pembangunan Alternatif Untuk Aceh
Bersih Narkoba

Inspirasi Bulan Ini

“BELAJAR DARI SEMANGKUK ES KRIM”



Pada suatu hari, ketika semangkuk es krim *sundae* lebih murah, seorang anak berusia 10 tahun memasuki sebuah kedai kopi dan duduk di meja. Seorang pelayan menaruh segelas air di depannya.

“Berapa harga untuk semangkuk es krim *sundae*?”

“Rp. 50.000,” jawab si pelayan.

Anak kecil itu menarik tangannya keluar dari saku dan menghitung sejumlah koin di dalamnya.

“Berapa harga untuk semangkuk es krim plain?” Anak itu bertanya lagi. Beberapa orang sekarang menunggu untuk mendapatkan meja dan pelayan mulai sedikit tidak sabar.

“35.000 ..!” kata pelayan tersebut dengan kasar.

Anak kecil tersebut menghitung koin lagi, dan akhirnya mengatakan “Saya ingin membeli semangkuk es krim plain,” katanya.

Pelayan membawakan es krim pesanan anak tersebut, meletakkan tagihan di atas meja dan berjalan pergi meninggalkan si anak. Setelah anak itu selesai memakan es krim, ia membayarnya di kasir dan pulang.

Ketika si pelayan datang kembali untuk membersihkan meja, ia mulai mengelap meja dan kemudian menelan ludah karena apa yang dia lihat. Di meja tersebut, ditempatkan rapi di samping piring kosong, koin senilai Rp. 15.000, tip untuk si pelayan dari anak yang tadi dia anggap menyebalkan.

Hikmah yang dapat kita petik dari cerita diatas adalah : Jangan menganggap remeh atau memandang rendah orang lain, karena bisa jadi orang tersebut yang justru akan membantu anda ketika anda mengalami sebuah kesulitan.

LUNTURNYA BUDAYA BANGSA

Oleh: Muhammad Iqbal

Kata budaya “berasal” dari Bahasa Sanskerta “budhayah” yang merupakan bentuk jamak dari “budhi” atau paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk sesuatu. Secara semantik, budaya dapat didefinisikan dengan sederhana yaitu cipta, rasa, dan karsa (kekuatan jiwa) suatu masyarakat. Kemudian turunan kata budaya adalah “kebudayaan” sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa dari masyarakat itu sendiri.

Artikel ini bukan bermaksud untuk mendiskusikan budaya dan kebudayaan secara detail, karena keberadaannya memiliki multi persepsi yang sangat variatif baik pada tataran formal dan informal maupun nonformal. Contoh sederhana, berbagai strata masyarakat menggunakan ragam kata budaya dengan paduan kata lainnya dalam ungkapan sehari-hari mulai dari yang positif seperti budaya disiplin hingga negatif misalnya budaya korupsi, tergantung konotasi rangkaian kalimatnya. Oleh karena itu, artikel singkat ini hanya bertujuan untuk menyingkap secara sekilas tentang substansi implementasi budaya bangsa Indonesia yang belakangan ini ditengarai mulai luntur karena perkembangan zaman.

BUDAYA BANGSA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk oleh berbagai budaya dari ragam

suku, etnis, bahasa, agama, dan lain-lain. Dengan keragaman tersebut Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang majemuk atau multikultural. Namun patut disyukuri tetapi perlu terus dijaga bahwa masyarakat Indonesia dapat hidup langgeng dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika” yang maknanya sangat dalam dan mendasar yaitu “berbeda-beda tetapi tetap satu (unity in diversity).”

Budaya suatu bangsa sejatinya bersifat dinamis yang dapat saling pengaruh-mempengaruhi seiring perkembangan zaman dan kronologi sejarah yang melatarbelakanginya. Dari kronologi sejarah tersebut budaya dapat dibedakan secara garis besar menjadi budaya asli (*indigenous culture*) dan budaya campuran (*mixed culture*) yang terbentuk karena proses alkulturasi serta asimilasi.

Sejalan dengan kehidupan yang terus bergulir, budaya mengalami transformasi dan adaptasi secara alami. Apalagi dengan fenomena aktual saat ini yang paralel dengan era globalisasi melalui proses integrasi internasional karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya, maka mau tidak mau dan suka tidak suka budaya bangsa Indonesia seyogianya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Namun hal yang perlu digaris bawahi adalah transformasi tersebut ada yang bersifat positif dan sebaliknya juga negatif. Oleh karena itu, adaptasi terhadap transformasi budaya perlu disikapi secara positif dan negatif pula.

transformasi dan adaptasi budaya yang bersifat positif dapat memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Sebaliknya, jika transformasi dan adaptasinya bersifat negatif, maka dapat menyebabkan lunturnya atau degradasi budaya dan yang lebih fatal lagi dampaknya adalah kehilangan jati diri bangsa.

LUNTURNYA BUDAYA BANGSA

Pertanyaan mendasar yang pantas diajukan adalah “apakah budaya bangsa kita sudah mengalami kelunturan?”. Bahkan menurut beberapa pihak yang bersikap kritis, budaya bangsa kita sudah mengalami degradasi yang mengkhawatirkan. Terlepas dari semua itu, budaya kita saat ini memang sedang dalam posisi luntur, tetapi barangkali terlalu ekstrim kalau dikatakan sudah mengkhawatirkan. Istilah yang cukup tepat adalah “perlu diwaspadai”.

Secara umum salah satu budaya masyarakat Indonesia yang sudah mulai agak sirna adalah “gotong royong.” Pelan tapi pasti, semangat gotong royong yang menjadi kearifan lokal turun temurun bangsa Indonesia telah mengalami penurunan. Gotong royong tidak lagi menjadi budaya spontanitas melainkan bermetamorfosis menjadi budaya materialistis dan seremonial. Misalnya, partisipasi dalam kegiatan gotong royong dapat digantikan dengan uang dan terkadang bersifat seremonial minus keikhlasan.

Belakangan sebagian partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong cenderung berorientasi insentif (*participation for material incentive*) terutama pada implementasi kegiatan proyek padat karya. Akan tetapi, jika terkait dengan problematika komunal terutama bencana alam, kegotongroyongan masyarakat masih tetap eksis. Apakah harus ada bencana dulu, baru bergotongroyong?. So pasti, tidak...!

Paling tidak ada tiga penyebab utama lunturnya budaya bangsa. Pertama, kurangnya kesadaran dalam menjaga budaya lokal karena cenderung menyukai budaya asing yang dianggap praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, minimnya komunikasi dalam rangka ketahanan budaya bangsa. Ketiga, kurangnya pembelajaran substansi budaya dalam rangka adaptasi terhadap budaya asing sesuai konteks perkembangan zaman.

Fenomena lunturnya budaya bangsa yang cukup nyata dan dapat diamati dengan kasat mata adalah di kalangan generasi muda. Secara psikologis generasi muda adalah generasi yang sedang dalam proses pencarian jati diri, sehingga bisa labil dalam budaya atau dapat mengalami “gegar budaya (*cultural shock*)” atau mungkin ketinggalan budaya (*cultural lag*). Salah satu tanda gear budaya adalah mulai hilangnya identitas diri. Sementara itu, diantara ciri ketinggalan budaya yaitu kurangnya kemampuan daya pikir personal dengan perkembangan sosial.

Itulah realitanya, dimana saat ini budaya Indonesia memang sedang mengalami kelunturan, terutama di kalangan generasi muda atau generasi millennial. Generasi tersebut lahir sekitar tahun 1980-an hingga tahun 2000-an dengan ciri-ciri yang cukup spesifik terutama terkait dengan teknologi khususnya internet dan hiburan (*entertainment*). Generasi millennial juga dikenal dengan istilah generasi Y (usia 16-35 tahun) yang posisinya berada di antara generasi X (usia di atas 35 tahun) dan generasi Z atau generasi post-millennial (usia 6-16 tahun). Generasi millennial adalah harapan bangsa khususnya terkait dengan peran mereka dalam menyongsong era bonus demografi (*demographic dividend*) terutama selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2030.

Seiring semakin kencangnya arus perubahan kehidupan melalui globalisasi, dunia seakan tanpa batas (*a world without border*). Jangkauan, intensitas, kecepatan, dan pengaruh globalisasi dengan mudah merasuk ke dalam sendi-sendi budaya apabila tidak ada upaya seleksi penyaringan. Dalam konteks kehidupan sekarang, generasi muda bangsa sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang menyebar dengan cepat (*viral*) seperti pornografi dan pemberitaan palsu (*hoax*) melalui teknologi informasi utamanya media sosial. Apalagi jika sudah dipengaruhi narkoba dan obat/bahan berbahaya (*narkoba*) yang merusak fisik dan mental bangsa.

Ada suatu fenomena yang memprihatinkan bahwa budaya barat dianggap lebih unggul dibandingkan budaya timur atau lokal, atau dapat dikatakan “inlander mentality”. Kecenderungan sebagai pengikut (*follower*) budaya asing lebih kentara dibandingkan dengan kebanggaan menunjukkan (*trendsetter*) budaya lokal. Untuk hal semacam ini kita patut bercermin kepada beberapa negara misalnya Jepang, India, dan Korea. Jepang maju dalam teknologi dengan tetap mempertahankan budaya lokal seperti prinsip bushido (kerja keras, samurai (pantang menyerah), keishan (sungguh-sungguh), dan kai zen (berkomitmen). India dengan pengenalan budaya ke mancanegara melalui industri perfilman Bollywood. Korea dengan industri hiburan seperti K-Pop dan K-Drama yang merambah kancah internasional, atau dikenal dengan Hallyu atau gelombang Korea (*Korean wave*). Padahal budaya Indonesia sendiri cukup beragam, unik, dan tidak kalah untuk dipopulerkan secara global.

Paling tidak ada empat nilai budaya asing yang sangat berpotensi melunturkan budaya lokal bangsa Indonesia, sehingga harus selalu diwaspadai. Pertama, individualisme atau sifat mementingkan diri sendiri dan mengingkari kodrat manusia sebagai makhluk sosial sehingga bertentangan dengan budaya Indonesia yang lebih mengutamakan kebersamaan. Kedua, hedonisme atau gemar hura-hura untuk kesenangan belaka tanpa kerja keras. Ketiga, konsumerisme atau sifat menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang

tidak perlu, dimana barang lebih ditentukan oleh gayanya bukan fungsinya. Keempat, sekularisme atau sikap yang memisahkan antara agama dengan urusan dunia, dimana terjadi persepsi salah kaprah terhadap agama yang hanya dipandang sebagai proses ritual semata.

Lantas apa langkah yang harus dilakukan guna mencegah lunturnya budaya bangsa? Pertanyaan ini tidak lebih mudah untuk dijawab dibandingkan dengan mengajukannya. Namun perlu ada solusi jalan keluar dalam menyikapi lunturnya budaya bangsa tersebut.

SOLUSI MENGATASI LUNTURNYA BUDAYA BANGSA

Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa lunturnya budaya bangsa tidak tepat dengan cara mengambihitamkan globalisasi semata. Dengan demikian, perlu suatu dekonstruksi budaya melalui proses kehidupan (*imanensi*) dan mengubahnya (*transedensi*) dalam koridor jati diri bangsa.

Upaya untuk mencegah kelunturan seraya melestarikan budaya bangsa dapat dilakukan melalui perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

Di satu sisi, budaya bangsa memiliki kekuatan sebagai aset warisan yang beraneka ragam, unik, dan khas sebagai representasi identitas Indonesia. Namun, kelemahannya antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pembelajaran, dan minimnya komunikasi budaya. Di sisi lain, budaya bangsa memiliki peluang pengembangan diantaranya karena apresiasi dunia, rasa persatuan, multikulturalisme, dan pariwisata.

Sementara itu, tantangannya terkait dengan perubahan lingkungan alam dan fisik, kemajuan teknologi, dan masuknya budaya asing. Oleh karena itu, sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian, langkah pencegahan pudarnya budaya bangsa paling tidak dapat dilakukan melalui tiga wacana (*discourses*) yaitu revolusi mental, pendidikan karakter, dan bela negara.

Melalui revolusi mental, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan kalau ingin maju. Pertama, memiliki perencanaan yang matang dengan orientasi ke masa depan (bagaimana besok, bukan besok bagaimana). Kedua, mengerjakan sesuatu dengan serius dan komit (*growth philosophy*). Ketiga, berperilaku ulet, beretos kerja tinggi, dan pantang menyerah. Keempat, tidak memutarbalikkan logika, fakta, norma, dan nilai sosial (*retreatism*). Kelima, menghilangkan keengganan untuk berubah secara positif (*inertia*).

Melalui pendidikan karakter, ada 18 nilai-nilai perilaku dalam pengembangan pendidikan

budaya dan karakter bangsa yang perlu diterapkan. Masing-masing adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, perhatian sosial, dan bertanggungjawab.

Melalui bela negara, fokusnya adalah para generasi muda dengan cara proses pembudayaan bangsa yang bersifat konkret mengingat mereka merupakan pewaris dan pelaku budaya pada masa mendatang. Penanaman semangat bela negara perlu dilakukan melalui proses perubahan perilaku sesuai dengan pranata sosial dengan metode pembinaan yang berkesinambungan. Konsepnya paling tidak bersifat psikologis (mencintai tanah air), geografis (membela tanah air), sekuriti (menjaga stabilitas), dan dedikatif (loyal terhadap bangsa dan negara).

Lunturnya budaya bangsa seyogianya harus dicegah dari dua sisi, yaitu hulu dan hilir. Sisi hulu terkait dengan potensi masyarakat (modal sosial) dan sisi hilir berhubungan dengan eksistensi permasalahan. Oleh karena itu, pencegahan lunturnya budaya bangsa dapat dilaksanakan melalui metode pendidikan yang tidak hanya fokus pada pencerdasan berdasarkan pengetahuan faktual empiris (kognitif) semata tetapi juga mengikutsertakan aspek sosial.

Tiga paradigma atau tiga kekuatan yang berfungsi sebagai kesaktian bangsa (Trisakti) sebagaimana diamanatkan dalam pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1964 dengan tema "Vivere Pericoloso (hidup menyerempet bahaya)" patut dicerna ulang dan diterapkan.

Isi dari Trisakti tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Berdaulat dalam Politik;
- (2) Berdikari dalam Ekonomi; dan
- (3) Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Guna mencegah lunturnya budaya bangsa, aspek "Berkepribadian dalam Kebudayaan" dapat dijadikan sebagai azimat ampuh sekaligus dalam rangka menangkal pengaruh negatif budaya asing ke Indonesia.

Khusus untuk generasi muda, perlu digugah isi Soempah Pemoeda tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa:

"....Kami Poetra-Poetri Indonesia Mengakoe Bertoempah Darah jang Satoe Tanah Indonesia. Kami Poetra-Poetri Indonesia Mengakoe Berbangsa jang Satoe Bangsa Indonesia. Kami Poetra-Poetri Indonesia Mendjoengdjoeng Bahasa Persatoean Bahasa Indonesia".

Isi Soempah Pemoeda tersebut sangat sarat menyangkut aspek budaya dan kebudayaan dengan kata kunci tanah tumpah darah, bangsa, dan bahasa.****

HARI INI KITA BICARA BUDAYA: OTT KPK Terhadap Kepala Daerah

Oleh: Victorio Litaay

Hari ini kita bicara budaya, demikian yang teretus dalam pikiran saya ketika akan memulai tulisan ini yang temanya ialah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konon budaya yang adalah sistem nilai atau cara pandang dan cara berinteraksi dalam hidup memiliki tingkatan tersendiri. Tingkat terendah adalah *style*, atau gaya, yang lebih pada *individual style*.

Jika *style* tersebut mulai diterima banyak orang dan dipraktikkan pula oleh generasi tersebut, maka *style* sudah meningkat menjadi *trend* atau tren. Tren ini kemudian berulang, dan bisa jadi memiliki kembangan sendiri-sendiri, tapi mengakar pada nilai yang sama.

Apabila *trend* ini terus bertahan, hingga lintas generasi, maka kita sedang berada di ambang lahirnya *culture* atau budaya baru. Tentunya setiap individu dapat menjadi bagian dari satu atau lebih budaya yang berbeda.

Perang terhadap korupsi di Indonesia adalah topik yang amat luas, sementara OTT KPK pun yang adalah bagian dari topik tersebut, masih terlalu luas untuk dibahas tuntas di sini. Keterbatasan ruang membuat harus ada batasan atau fokus sorotan yang dibawakan. Dengan pertimbangan itulah maka yang akan menjadi sorotan ialah OTT KPK terhadap para kepala daerah, dan dihubungkan dengan budaya bangsa dan ketahanan nasional.

OTT KPK DAN KEPALA DAERAH

September 2017, portal berita Okezone

News (16/7) menurunkan tulisan tentang empat kepala daerah yang terjaring OTT KPK, sambil mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri yang pasrah terkait banyaknya kepala daerah yang ditangkap. Selang tiga hari, Kompas.com menurunkan laporan yang mirip, tapi tidak empat melainkan lima kepala daerah terjaring. Statistik KPK yang dikutip Kompas.com (19/9) menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga Juni 2017 saja telah ada 78 kepala daerah yang terjaring KPK, yang meliputi 18 Gubernur dan 60 Walikota atau Bupati maupun wakilnya.

Tahun ini KPK menjalankan Strategi Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi dengan yang salah satu wujudnya ialah maraknya OTT. OTT oleh KPK tahun 2017 dilaksanakan tidak hanya di ibu kota negara, namun juga merambah berbagai wilayah di tanah air, seiring dengan diberlakukannya Wilayah Koordinasi dan supervisi, Pencegahan (Korsupga) yang meliputi hingga 21 provinsi. Luasan cakupan kerja KPK tentunya akan terus bertambah, dan bukan tidak mungkin publik masih akan terus dikagetkan dengan berbagai OTT.

Berkaitan dengan banyaknya pejabat, baik kepala daerah maupun pejabat lainnya yang terkena OTT, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo di tahun 2016 menekankan pentingnya KPK berada di daerah, berinteraksi dengan pejabat setempat, agar para pejabat daerah mengenal area-area rawan korupsi. Tentunya agar para pejabat tersebut tidak terkena kasus setelah adanya pengembangan kasus, namun Mendagri juga mengingatkan bahwa khusus untuk OTT, para pejabat daerah yang terkena harus menanggung sendiri perbuatannya.

Sebelum KPK aktif menjalankannya, istilah OTT tidak dikenal masyarakat. Adapun istilah itu bukanlah istilah resmi, namun makin populer karena mudah dipahami publik. Mengutip Prof. Dr. Hibnu Nugroho, istilah sebenarnya sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tertangkap tangan atau penangkapan yang telah didahului oleh adanya penyelidikan dan bukti-bukti awal yang cukup. Hal ini jugalah yang mungkin saja menyebabkan tidak semua pejabat yang menjadi target OTT merasa bersalah, sementara KPK sendiri merasa sudah melakukan hal yang benar, karena OTT selalu didahului setidaknya penyelidikan hingga enam bulan sebelumnya.

Ketika mengetik *frase* budaya korupsi di Indonesia, di mesin pencari Google, Oktober 2017, rata-rata entri yang muncul membahas tentang Budaya Korupsi. Adapula yang mempertanyakan Benarkah Korupsi Sudah Menjadi Budaya. Lima entri teratas saat laman Google diakses untuk tulisan ini mengandung kedua hal tersebut di atas.

Saat mengetikkan frase Operasi Tangkap Tangan KPK, tanpa mengutak-atik lebih jauh bagian pengaturan atau setting di laman Google yang digunakan penulis, sembilan entri teratas menyajikan berita maupun ulasan beberapa kejadian OTT baik terhadap pejabat pemerintah di pusat, maupun pejabat dan kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dalam kurun Agustus-hingga September 2017 saja.

Apapun istilahnya, namun OTT telah menjadi sebuah tren dalam sepak terjang pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh KPK. Hampir dapat dipastikan bahwa target OTT tidak ada yang lolos dari jerat hukum. Di tahun 2016, KPK bertekad memberikan perhatian khusus untuk kegiatan OTT dengan menugaskan personilnya menangani aktivitas itu.

OTT DALAM PERANG BUDAYA

Perang budaya yang dimaksud di sini ialah peperangan antara budaya anti korupsi, yang berhadapan dengan budaya korup. Namun sebelum dilanjutkan, harus diingat bahwa yang berhak memvonis seseorang bersalah bukanlah masyarakat, tapi pengadilan dan karena yang diperangi adalah pola pikir atau cara pandang yang kemudian berwujud dalam praktek, maka setiap manusia pelaku pun harus diselamatkan, dari jeratan budaya korup.

Seorang senior pernah menyampaikan dalam bincang-bincang budaya, bahwa masyarakat pesisir akrab dengan pernyataan bahwa membusuknya seekor ikan dimulai dari kepalanya. Artinya bahwa baik dan buruknya pola hidup masyarakat, termasuk para pejabat pemangku kepentingan, dipengaruhi oleh kepemimpinan. Itulah sebabnya pemerintahan yang bersih, dimulai dari tercapainya pemunculan sosok pemimpin yang bersih.

Selain itu, dalam ilmu kepemimpinan dan

manajemen, dikenal pandangan bahwa *culture is made by the leader*. Dengan demikian, upaya memerangi korupsi, harus dimulai dari para pemimpin yang bersih.

Tidak mudah untuk sebuah *style* berkembang menjadi tren, dan kemudian membudaya. Hal tersebut harus melalui ujian kehidupan, dan banyak dijumpai berbagai tren yang tidak dapat bertahan, dan tidak menjadi budaya. OTT sendiri tidak bisa dianggap sebagai suatu budaya. Jika budaya adalah anti korupsi, maka OTT lebih menjadi *style*, yang bahkan belum menjadi tren, OTT bisa menjadi tren jika dilakukan oleh berbagai instansi penegak hukum. OTT juga dapat disebut sebagai suatu even budaya semata, dan bukan menjadi budaya itu sendiri.

Itulah kenapa OTT masih menimbulkan pro dan kontra, bahkan di dalam masyarakat yang berbudaya anti korupsi. Selain itu, dasar hukum OTT sendiri belum dibuat, untuk dapat menjadikan OTT sebagai pilihan efektif pemberantasan korupsi di Indonesia. OTT hingga saat ini menempel sebagai interpretasi KPK terhadap pewujudan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, dan peraturan KPK sendiri, seperti Organisasi dan Tata Kerja KPK serta Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

Dengan demikian, OTT tidak bisa diharapkan akan mendorong terciptanya pemimpin atau penggerak semangat anti korupsi. OTT sangat efektif dalam memberikan efek kejut, namun dengan terus bertambahnya angka pemimpin daerah yang terkena OTT sejak 2004, maka diperlukan langkah yang lebih komprehensif agar budaya anti korupsi kemudian dapat dipahami dan menjadi bagian dari wajah pemerintah maupun bangsa Indonesia.

Dari sisi ketahanan nasional, budaya atau bukan, korupsi sudah sangat mengakar dan menjadi bagian yang sulit dihilangkan, serta melemahkan ketahanan nasional, karena menggerogoti sisi pemanfaatan aspek alamiah, dan melemahkan pengembangan aspek kehidupan sosial. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini, yang disebut Nawa Cita, upaya penciptaan pemerintahan yang bersih sebagaimana Nawa Cita 2 dan penciptaan penegakan hukum yang bebas korupsi sebagaimana dalam Nawa Cita 4, menjadi tidak bisa ditawar lagi.

Sudah saatnya OTT KPK mendapat porsi pemikiran lebih serius dari pemerintah dan parlemen, akan menjadi bagian manakah dari budaya anti korupsi tindakan OTT ini. ****



KONGRES PEMOEDA KE-II
JAKARTA 27/28 OKTOBER 1928

Menguak Makna Sumpah Pemuda di Era Millennial Merajut Nasionalisme yang Mulai Kusut

Oleh: Jumari Haryadi

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari peran para pemudanya. Peristiwa ikrar Sumpah Pemuda yang terjadi 89 tahun lalu, atau tepatnya pada 28 Oktober 1928 itu telah menginspirasi lahirnya NKRI. Rasa nasionalisme tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang tumbuh dalam sanubari para pemuda saat itu, telah menjadi sebuah ikatan erat dalam memicu lahirnya bangsa Indonesia yang diproklamkan Soekarno-hatta pada 17 Agustus 1945 silam.

Memang pada awalnya para pemuda ini terpecah dalam kelompok-kelompok kepemudaan yang cenderung bersifat kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Bataks Bond, Jong Sumatranen Bond (JSB), Jong Selebes, Jong Minahasa, Jong Ambon dan lain-lainnya. Namun, dalam perjalanan selanjutnya para pemuda ini menyadari kalau mereka memiliki persamaan dalam nasib dan perjuangan. Hal inilah yang menyatukan mereka, lalu bersama-sama berusaha mewujudkan dalam sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda.

REFLEKSI LAHIRNYA SUMPAH PEMUDA (PEMUDA SEBAGAI PELAKU SEJARAH)

Peristiwa Lahirnya Sumpah Pemuda 1928

tidak hadir begitu saja. Kejadian itu diawali pada 1926, saat beberapa tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) – sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia – beserta para cendekiawan menyampaikan ide untuk menyatukan berbagai organisasi yang berbasis pemuda yang ada di Indonesia.

Sejak saat itu secara maraton sepanjang 1926, para tokoh PPPI dan tokoh pemuda lainnya seperti dari Jong Java, Jong Celebes, Jong Soemantranen Bond, Jong Timoreesch Verbond, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Indonesisch Studieclub, Algemene Studieclub, Perhimpunan Indonesia, Pemuda Indonesia, dan Jong Islamieten Bond (JIB) secara rutin mengadakan berbagai pertemuan. Mereka ingin merealisasikan rencana menyatukan organisasi kepemudaan yang ada.

Pada tahun berikutnya para pemuda tersebut melanjutkan pertemuan mereka, tepatnya pada 20 Februari 1927, Mei 1928, dan terakhir pada 12 Agustus 1928. Pertemuan terakhir tersebut paling lengkap karena dihadiri oleh seluruh barisan organisasi pemuda yang ada di Indonesia pada saat itu.

Berdasarkan pertemuan terakhir tersebut kemudian mereka menyepakati untuk mengadakan kongres pemuda pada Oktober 1928. Susunan panitianya diambil dari perwakilan organisasi pemuda dan masing-masing diberi tugas untuk

memegang satu jabatan dalam kepanitiaan. Beberapa tokoh pemuda yang hadir saat itu di antaranya adalah J. Leimena, Muhammad Yamin serta Sugondo Djojopuspito.

Kongres pemuda akhirnya benar-benar dapat direalisasikan selama 2 hari yaitu 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Sekarang Jakarta). Kemudian atas prakarsa PPPI, kongres dilaksanakan di tiga lokasi yang berbeda dan dibagi menjadi tiga Pertemuan yaitu pertemuan pertama, dilaksanakan pada Sabtu, 27 Oktober 1928 di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (GOC), Waterlooplein

harus memperoleh pendidikan yang layak. Menurutnya harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Selain itu, anak-anak juga perlu dididik secara demokratis.

Pertemuan Ketiga, sore harinya pada Minggu, 28 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Indonesische Clubgebouw, Jalan Kramat Raya 106 Batavia (sekarang dinamakan Gedung Sumpah Pemuda). Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sementara itu Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa



Foto: Internet

(sekarang Lapangan Banteng). Dalam sambutannya, Sugondo Djojopuspito sebagai Ketua kongres Pemuda berharap agar konferensi tersebut dapat memperkuat semangat persatuan di benak pemuda.

Selanjutnya Moehammad Yamin menjelaskan tentang makna dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Pertemuan kedua, dilaksanakan pagi sampai siang hari pada Minggu, 28 Oktober 1928 di Gedung Oost-Java Bioscoop, Koningsplein Noord, atau Medan Merdeka Utara 14. Pertemuan ini banyak membahas seputar dunia pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak-anak

dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak dan disiplin diri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Kongres pemuda tersebut menghasilkan sebuah rumusan teks Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Moehammad Yamin. Hal menarik dalam kongres pemuda saat itu adalah dimainkannya instrumen lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman saat penutupan acara.

KRONOLOGIS LAHIRNYA TEKS SUMPAH PEMUDA

Secara kronologis, ada satu orang yang sangat dominan dalam melahirkan rumusan teks

Sumpah Pemuda yaitu Moehammad Yamin. Ketika kongres pemuda sedang berlangsung, Moehammad Yamin menulis teks sumpah pemuda pada secarik kertas. Teks tersebut lalu diserahkan kepada Soegondo (Ketua Panitia Kongres) ketika Mr. Sunario sedang berpidato pada sesi terakhir kongres (sebagai utusan kependuan).

Saat itu Moehammad Yamin berbisik kepada Soegondo, "Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie (saya memiliki formulasi yang lebih elegan untuk ini keputusan Kongres)."

Kemudian Soegondo memberi tanda tangan sebagai tanda setuju pada selebar kertas, selanjutnya diteruskan kepada orang lain untuk disetujui juga. Selanjutnya naskah sumpah tersebut dibacakan oleh Soegondo dan dijelaskan panjang lebar oleh Moehammad Yamin.

Pada awalnya, naskah teks Sumpah Pemuda tidak sama dengan teks yang selama ini selalu dibacakan pada setiap perayaan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati bangsa Indonesia setiap tanggal 28 Oktober. Namun, teks Sumpah Pemuda tersebut beberapa kali mengalami perubahan. Berikut adalah bunyi dari teks Sumpah Pemuda dari awal dibuatnya sampai final dipakai sebagai pedoman bangsa Indonesia:

Teks Sumpah Pemuda Versi Original

SOEMPAH PEMOEDA

Pertama

Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedoeua

Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga

Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Teks Sumpah Pemuda Versi Final

SUMPAH PEMUDA

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

AKSI PENTING PEMUDA DI MASA GENTING (PEMUDA SEBAGAI PENGIKUT GENERASI TERDAHULU)

Sejak Indonesia merdeka, peran pemuda tidak diragukan lagi kiprahnya dalam menjaga

keutuhan NKRI. Berbagai peristiwa penting yang sempat membuat goyah negeri ini sering terjadi sebagai tanda dari sebuah negara yang sedang berkembang. Hal ini tentu saja bisa dimaklumi karena bangsa Indonesia saat itu masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Beberapa kali sempat terjadi pemberontakan dalam negeri yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang syah, tetapi semua persoalan itu mampu diatasi dengan baik. Namun, dari semua kasus yang terjadi, setidaknya penulis mencata ada dua peristiwa penting yang sangat vital bagi bangsa Indonesia yaitu lahirnya Komponen 66 paska pemberontakan Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan G30S PKI, serta lahirnya Angkatan 1998 paska jatuhnya pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto.

A. Lahirnya Komponen 66

Pemuda selalu hadir di garda terdepan ketika negara membutuhkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kiprah kaum muda tidak boleh disepelekan dalam berlangsungnya kehidupan bernegara di tanah air kita tercinta ini. Saat situasi *chaos* dan negara berada diambang kehancuran, para pemuda selalu bangkit bahu membahu dalam mempertahankan keutuhan NKRI.

Salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia adalah saat jatuhnya pemerintahan Orde Lama paska pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Setahun berikutnya muncul sebuah gerakan yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menyuarakan tiga tuntutan yang dikenal dengan sebutan TRITURA Tri (Tiga) Tuntutan Rakyat. Ketiga tuntutan itu adalah pertama, Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormas-ormasnya; kedua Perombakan Kabinet Dwikora; dan ketiga, turunkan harga pangan yang saat itu melejit tinggi.

Aksi turun ke jalan para mahasiswa tersebut mencapai puncaknya pada 24 Pebruari 1966. Saat itu ada salah seorang aktivis mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim yang meninggal dunia akibat terkena tembakan dari Resimen Tjakrabirawa. Sehari setelah kejadian tersebut, pemerintah mengusulkan pembubaran KAMI. Ternyata hal itu justru menyulut kaum muda semakin gencar melakukan aksi-aksi demonstrasi.

Efeknya sungguh luar biasa. Stabilitas politik, hukum, dan keamanan terganggu. Negara diambang chaos, sehingga akhirnya memaksa Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan sebutan SUPERSEMAR yang menjadi cikal bakal turunnya Soekarno turun dari tampuk kekuasaannya sekaligus mengakhiri era Orde Lama.

B. Lahirnya Angkatan 1998

Krisis moneter yang terjadi pada 1998 membuat pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto ikut goyah.

Situasi perekonomian Indonesia saat itu yang tidak menentu merupakan imbas dari terjadinya resesi ekonomi dunia. Akibatnya sungguh tragis. Pemerintahan Soeharto limbung dan kehilangan kendali.

Kondisi tersebut mirip dengan apa yang pernah terjadi pada 1966. Seolah sejarah terulang kembali. Saat itu ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut reformasi atas pemerintahan Soeharto yang mereka anggap otoriter. Aksi ini kian semakin memanas ketika ada empat mahasiswa Universitas

Apa itu generasi millennial? Generasi millennial adalah generasi yang dikenal dengan sebutan generasi "Y" sebutan untuk generasi pemuda yang lahir di era 1990-an. Salah satu ciri generasi ini adalah berusia muda (usia dibawah 30 tahun). Generasi ini hadir di era digital yang memiliki banyak kemudahan dalam mencari informasi. Tentu hal ini tidak terlepas dari loncatan teknologi yang pertumbuhannya begitu pesat.

Selain itu generasi milenial ini umumnya lebih cerdas dari generasi sebelumnya. Mereka lahir dengan berbagai kemudahan dan fasilitas dari orang tuanya. Mereka bukan seperti generasi sebelumnya yang lebih suka melamar kerja, tetapi mereka lebih suka bekerja sendiri, kreatif dan inovatif.

Namun, sisi kelemahannya juga banyak. Mereka lebih cenderung bersikap individualistik, cuek, dan kurang peduli dengan orang lain. Pengamatan yang paling mudah untuk membuktikan hal ini bisa kita amati di jalan raya.

Tidak jarang generasi milenial ini sudah sukses di usia muda. Dukungan teknologi membuat semuanya menjadi mudah. Banyak di antara mereka yang sukses berjualan *online*, mencari uang melalui kompetisi *games online*, mendapatkan uang dari hasil pemasangan iklan di blog pribadi, sampai menjadi seorang *Video blogger* dan menghasilkan puluhan juta perbulan dari bisnis video yang dibuatnya.

Tidak aneh juga kalau saat ini kita sering mendengar istilah *StartUp* daripada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemuda di era millennial ini lebih bangga menyebut usahanya dengan istilah *StartUp*, daripada UMKM. Cara berpikir mereka yang visioner dan selangkah lebih maju dari generasi sebelumnya, membuat mereka terlihat lebih dinamis dalam menyongkong karirnya secara pribadi.

Sayangnya situasi semacam ini tidak selamanya positif. Pemuda generasi milenial cenderung lebih asyik memikirkan diri sendiri dan kehidupan mereka cenderung lebih ke arah individual dan *multitasking* melakukan pekerjaan ganda pada saat bersamaan. Kita bisa lihat betapa banyak pemuda yang sedang mengobrol dengan sesama temanya sambil memainkan *smartphone*-nya masing-masing.



Foto: Internet

Trisakti yang menggelar aksi damai, kemudian meniggal dunia akibat tindakan represif aparat keamanan. Kondisi ini memicu semakin maraknya aksi demo mahasiswa turun ke jalan yang juga mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

Akhirnya aksi tersebut mencapai titik klimaks ketika pada 19 Mei 1998 mahasiswa mulai menduduki gedung MPR/DPR RI. Sehari setelah pendudukan gedung parlemen, pada 20 Mei 1998 Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI menyatakan mundur dari jabatannya. Runtuhlah sudah rezim Orde baru yang telah berkuasa selama 30 tahun

C. Peran Pemuda di Era Millennial (Pemuda Mulai Kehilangan Jati Diri Bangsa)

Lantas bagaimana peran pemuda di era milenial sekarang ini? Kondisinya ternyata jauh berbeda. Jika pada masa sebelumnya peran pemuda begitu lekat sebagai pemersatu bangsa, maka kondisi sekarang justru sangat memprihatinkan. Pesatnya kemajuan teknologi ternyata membuat pemuda lebih asyik menikmati kehidupannya sendiri dan kurang peduli terhadap bangsanya. Sikap acuh tak acuh melanda generasi ini, seolah mereka tenggelam dengan kemajuan zaman.

Satu hal yang cukup meresahkan adalah kurangnya kepekaan pemuda di era millennial terhadap lingkungannya, termasuk kondisi bangsanya. Mereka lebih asyik dengan urusannya sendiri, seolah-olah masalah bangsa bukan menjadi tanggung jawabnya. Hal ini tentu sangat membahayakan dan tidak boleh terus dibiarkan. Kalau para pemuda sudah tidak peduli dengan kondisi sosial disekitarnya, bukan mustahil akan membuat mereka menjadi rentan terhadap pengaruh luar yang bisa menjerumuskannya.

ditulis ulang dengan bahasa yang lebih baik. Mereka cenderung membaca sekilas, lalu langsung membaginya ke berbagai grup media sosial yang diikutinya.

Jika informasi yang mereka sebar itu valid dan bernilai positif, tentu efeknya bagus. Bagaimana kalau informasi tersebut ternyata hoax yang jelas-jelas selalu menyesatkan? Dampak negatifnya justru sangat luar biasa. Bisa menimbulkan kerawanan sosial yang berujung dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini sudah susah payah dibangun oleh pemerintah dan berbagai komponen bangsa lainnya.

Bangsa kita, khususnya para pemuda sekarang berada dalam masa transisi yang cukup mengkhawatirkan. Sudah menjadi tugas kita sebagai orang tua agar menjaga anak-anak kita generasi millennial agar lebih banyak membaca sejarah bangsanya, sehingga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

Selain itu, alangkah baiknya pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program pendidikan bela negara bagi semua komponen bangsa dan menghidupkan kembali Pendidikan Moral Pancasila dengan pola yang lebih baik.

Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2017 ini sebagai tonggak awal kebangkitan kembali para pemuda Indonesia. Mereka adalah generasi pejuang dan generasi pelopor yang selalu berpikir untuk kemajuan bangsa dan negaranya.

Selain itu kita berharap agar para pemuda juga mau dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang dikandung dalam ikrar sumpah pemuda yaitu kerja keras, menghargai perbedaan, bangga terhadap produk negeri sendiri dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Selamat Hari Pemuda, semoga Indonesia semakin jaya, dan pemudanya terus berkarya. Semua ini demi masa depan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan disegani bangsa-bangsa lain di dunia. ****



Foto: Internet

Pengaruh budaya asing juga bisa menjadi alat pemecah kesatuan NKRI. Budaya ini bisa masuk dengan mudah melalui internet dan tersebar dengan cepat melalui media sosial. Berbagai isu negatif yang disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab bisa memprovokasi pemuda untuk melakukan hal-hal negatif, misalnya melakukan tindakan brutal dan perilaku vandalisme, tanpa memikirkan dampaknya secara luas.

Lemahnya budaya literasi juga ikut memicu kerawanan sosial. Gerakan membaca yang dicanangkan pemerintahan Jokowi sudah membuat gerakan membaca begitu memasyarakat. Bahkan, saat ini telah banyak tumbuh Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sampai ke pelosok pedesaan. Sayangnya hal ini belum diiringi dengan budaya tulis.

Rendahnya budaya tulis dan ramainya budaya copas (*copy paste*) mengakibatkan masyarakat yang sudah senang membaca ini sering tersesat. Ketika mereka membaca sebuah informasi di dunia maya, tidak serta merta menyaringnya dan



PERPPU ORMAS MENJADI UNDANG-UNDANG Dibuat untuk Jaga Persatuan dan Kebinekaan

Oleh: Desi

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengesahkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang, Selasa (24/10). Pengesahan itu disepakati lewat mekanisme voting setelah upaya musyawarah mufakat tak tercapai.

Rapat Paripurna ini sendiri dihadiri 445 anggota saat diputuskan akan diambil kesepakatan berdasarkan voting. Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat mengatakan ada 314 anggota yang setuju dari 445 anggota tersebut. Sehingga, Fadli Zon pun mengetuk palu bahwa Perppu Ormas disepakati akan menjadi undang-undang.

Sebelum pengesahan dilakukan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya terhadap Perppu tersebut. Tercatat, tujuh fraksi menyetujui pengesahan Perppu tersebut, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura.

Di dalam dukungannya, sebanyak tiga fraksi pendukung, yakni Demokrat, PKB, dan PPP meminta pemerintah melakukan revisi atas sejumlah pasal dalam Perppu usai pengesahan

dilakukan. Sementara, tiga fraksi lainnya, yakni Gerindra, PAN, dan PKS secara konsisten menolak Perppu tersebut.

Pengesahan Perppu Ormas ini diwarnai dengan demonstrasi di depan Gedung DPR. Sejumlah elemen masyarakat menolak perppu tersebut menjadi undang-undang karena dinilai membrangus kebebasan berserikat dan berkumpul.

Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU itu dibuat untuk menjaga persatuan bangsa, untuk menjaga persatuan kita, untuk menjaga kebhinekaan kita, untuk menjaga ideologi negara kita Pancasila, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yaitu aturan undang-undang yang tidak lagi memadai. dan pemerintah tidak ingin bertindak sewenang-wenang dalam menertibkan organisasi kemasyarakatan pemerintah mempunyai tiga

pertimbangan dalam penerbitan Perppu yaitu

1. Tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
2. Terkait aturan hukum yang belum memadai.
3. Perppu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru.

Tiga pertimbangan itulah yang menjadi pijakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Melalui Perppu tersebut, pemerintah memperluas definisi mengenai

pembubaran ormas berbadan hukum harus melalui beberapa tahapan, yaitu pemberian sanksi administratif berupa tiga kali peringatan tertulis.

Setelah sah menjadi undang-undang pemerintah menjelaskan bahwa tujuan UU tentang organisasi masyarakat ini tidak melarang warga negara berpikir, bahkan lebih jauh tidak melarang untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham tertentu. Yang dibatasi menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ide, pikiran yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini penting demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Foto: Internet

ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Salinan Perppu bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebut, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945".

Sebelumnya, dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, definisi atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila terbatas pada "ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme".

Perppu Ormas menyederhanakan proses penerapan sanksi administratif kepada ormas yang melakukan pelanggaran. Pasal 61 ayat (1) Perppu Ormas menyatakan bahwa sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Artinya, peringatan tertulis tidak lagi diberikan secara bertahap. Pasal tersebut menghapus ketentuan di UU Ormas yang mengatur

Kegentingan yang memaksa yang menjadi dalil pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Menurutnya, dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, definisi bertentangan dengan Pancasila sangat terbatas. Sebab, UU tersebut hanya menjelaskan yang bertentangan dengan Pancasila adalah paham ateis, komunis dan beberapa paham yang berasal dari timur saja.

Terkait urgensi kegentingan memaksa, pemerintah menjelaskan situasi saat ini sangat jelas terlihat ada ormas yang ingin mengganti Pancasila, salah satunya dengan paham khilafah. Menurut Tjahjo, hal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan Nomor 17 Tahun 2013.

Dalam beberapa kesempatan pemerintah menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah menerbitkan Perppu tersebut karena tujuan baik lahirnya Perppu ormas dimaksudkan untuk mengamankan Ideologi Pancasila dan mengawal NKRI. Pemerintah mengaku sangat bersyukur dan mengapresiasi keputusan yang diambil wakil rakyat di Senayan. ****

PRESIDEN JOKO WIDODO:

BELA NEGARA AGAR DIBERIKAN DAN DIPERKUAT PENANGANANNYA KEPADA WANTANNAS DENGAN TIDAK MEMBENTUK ORGANISASI BARU



Oleh: Desi

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) menyelenggarakan Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dengan tema “Tugas dan Fungsi Dewan Ketahanan Nasional dan Bela Negara”, pada Rabu (18/10/2017).

Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM yang pada saat itu hadir sebagai narasumber Setjen Wantannas menyampaikan bahwa tantangan saat ini adalah peningkatan bela negara yang harus dilaksanakan karena kondisi ketahanan nasional selama lima tahun terakhir dinilai kurang tangguh (sesuai hasil Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional/Labkurtanas Lemhannas pada November 2016).

la menambahkan bahwa hal ini sesuai

dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 9 ayat 2d Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Namun Toto mengingatkan, agar dalam menerapkan nilai-nilai bela negara juga harus memperhatikan kekinian termasuk dalam menjalankan program-programnya.

Pada Hari Bela Negara, 19 Desember 2014 silam, sambung Toto, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Bela Negara mempunyai spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan. Revitalisasi peran Setjen Wantannas sendiri dikuatkan dengan Surat Sekretaris Kabinet tanggal 3 Februari 2017 yaitu Perintah Presiden bahwa masalah bela negara agar diberikan dan diperkuat penanganannya kepada Dewan Ketahanan Nasional dengan tidak membentuk organisasi baru. “Wantannas mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional

dan bela negara guna menjamin pencapaian tujuan nasional,” tutur Totok menjelaskan tugas baru Wantannas. penanganan dalam bela negara,” tambah Toto. Beberapa usulan baru tentang tugas Wantannas, lanjut Totok, salah satunya adalah penetapan rekomendasi rencana induk dan rencana aksi nasional pembinaan bela negara. Perubahan dalam hal struktur yang diusulkan, ada pada nomenklatur Kedeputusan yakni penguatan

Sedangkan konsep bela negara usulan Wantannas, pengelolannya hanya sebatas pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi. Jadi tidak melakukan program seperti halnya pelaksanaan bela negara yang ada di Kementerian Pertahanan atau kementerian lain.

“Apa yang sudah berlangsung di K/L lain tidak akan diambil oleh Wantannas, namun akan lebih terharmonisasi sesuai arahan pimpinan negara yaitu lebih efektif dan massif, dengan program kekinian yang dipadukan dengan nilai-nilai pada bela negara,” tambahnya lagi.

Disinggung mengenai substansi modul pembinaan bela negara, ia mengatakan bahwa Nantinya akan ada materi mengenai empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, etika berbangsa dan hal lain yang terkait bela negara,” pungkask Totok.

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum

Kementerian Komunikasi dan Informatika Prof. Dr. Henri Subiakto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ketahanan nasional kembali diuji oleh dinamika politik dan sosial bangsa Indonesia. Demikian pula dari sisi ideologi, pada kenyataannya sampai hari ini masih ada pihak yang menggugat ideologi Pancasila dan ingin menggantikan dengan ideologi selain Pancasila.

Hal ini mengisyaratkan bahwa ketahanan ideologi masih menjadi tantangan. Sifat ancaman Saat ini sudah bersifat multidimensi dan dari berbagai aspek yaitu ideologi, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Isu-isu dan segenap problematika ketahanan nasional menjadi perbincangan sekaligus kekhawatiran yang perlu didiskusikan agar dapat menjadi perhatian dari berbagai pihak.

Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan oleh Setjen Wantannas dihadiri oleh pejabat dan praktisi humas dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah serta undangan lainnya. Salah satu apresiasi dari peserta adalah mengenai tema yang dipilih (Bela Negara) yang dianggap memiliki interkoneksi antara ketahanan nasional dihadapkan pada wilayah Indonesia yang tersebar.

Apabila kondisi ketahanan bangsa kuat, maka akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. ****



Foto bersama peserta Forum Tematik Bakohumas, Rabu (18/10/2017)

SAATNYA MENUJU KOMUNIKASI PEMERINTAH YANG JELAS, AKURAT DAN TERPERCAYA



Foto: Internet

Oleh: Desi

Rabu (18/10/2017) bertempat di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat diselenggarakan Forum Arah Presiden RI tentang Komunikasi kehumasan Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dengan menghadirkan Narasumber Menteri Komunikasi dan Informatika Ir. Rudiantara. Sedangkan yang ditunjuk sebagai Moderator pada acara tersebut, Juru bicara Kepresidenan Johan Budi serta dihadiri oleh perwakilan dari 104 Instansi K/L dan BUMN diantaranya Sekretaris Jenderal K/L, Kepala Biro Humas K/L, Vice Presiden dan Direktur Komunikasi BUMN.

Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk menyamakan pemahaman atas peran penting Komunikasi Pemerintah yang jelas, akurat dan terpercaya; meningkatkan peran strategis Kehumasan Pemerintah, baik dari segi tata kelola, kompetensi dan akses informasi serta data; dan meningkatkan koordinasi, pertukaran informasi dan data publik antar Kementerian, Lembaga dan BUMN.

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) sebagai lembaga yang memiliki peran dalam kinerja pemerintahan ikut berpartisipasi dalam acara ini dengan menunjuk Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Brigjen TNI Isaac Marcus P. Misi yang diemban dalam kehadiran di acara ini yaitu Setjen Wantannas ingin menunjukkan bahwa secara internal ada keinginan untuk memperbaiki organisasi dengan tetap mengacu kepada pentingnya peran komunikasi pemerintah yang jelas, akurat dan terpercaya.

Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan pula kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi oleh kehumasan pemerintah yaitu:

1. Belum ada adanya juru bicara resmi pemerintah

2. Adanya kendala anggaran pada bagian humas (hanya bersifat *cost centre* dan belum menjadi prioritas);
 3. Sumber Daya Manusia yang belum memiliki sertifikasi kompetensi;
 4. Ruang lingkup pekerjaan humas yang terlalu luas;
 5. Belum adanya penyusunan strategi komunikasi
- Melihat pada kenyataan sekarang ini, perjalanan kehumasan pemerintah bukanlah yang mulus seperti keinginan banyak orang. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh humas pemerintah diantaranya 1) Masih adanya ego sektoral K/L dalam penyampaian data dan diseminasi; 2) Belum menjalankan pola pikir atau mindset 24/7/365 (24 Jam, 7 hari seminggu, 365 hari); dan 3) Manajemen untuk krisis komunikasi belum maksimal.

Guna menghadapi tantangan tersebut, maka Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, S.Stat, MBA menyampaikan tentang Layanan Forum Merdeka Barat 9 (#FMB9) yaitu sebuah forum yang beranggotakan seluruh K/L untuk bersama satu suara menjawab program dan isu yang berkembang di publik. Melalui forum ini, diharapkan media mendapatkan informasi yang lebih akurat secara langsung dari narasumber K/L/BUMN yang program atau isunya sedang diangkat dan Masyarakat mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang baik dan benar terkait dengan program atau isu tersebut.

Acara ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang selalu menyeimbangkan antara apa yang dilaksanakan dengan informasi yang seharusnya disampaikan humas pemerintah kepada masyarakat agar terjadi pemahaman yang baik terhadap apa yang sedang terjadi di pemerintahan saat ini.****

GUNA TURUT CERDASKAN BANGSA,

SETJEN WANTANNAS HADIRI RAKERPUS XXI DAN SEMINAR NASIONAL IPI 2017

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal (Biro PSP) Brigjen TNI Isaac Marcus P menghadiri kegiatan Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) XXI dan Seminar Ilmiah Nasional dengan tema “Peningkatan Profesionalisme Pustakawan dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan” yang diselenggarakan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di D.I. Yogyakarta beberapa waktu silam.

Keutamaan bagi Setjen Wantannas dan Biro PSP pada khususnya yang mana secara struktur organisasi membawahi langsung perpustakaan dan pustakawan adalah untuk memuliakan profesi pustakawan serta kehadiran perpustakaan erat kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri merupakan salah satu unsur yang kerap diangkat menjadi topik bahasan oleh Setjen Wantannas dalam penyusunan kebijakan dan sarat tindak kepada Ketua Wantannas yaitu Presiden RI. Selain daripada itu, Rakerpus sangat penting dihadiri guna meningkatkan pemahaman, menyamakan persepsi dan menyatukan komitmen pustakawan dalam meningkatkan kompetensi di bidang kepustakawanan dan wawasan kebangsaan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) D.I. Yogyakarta Budi Wibowo menyebut bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui wawasan kebangsaan serta menciptakan masyarakat pembelajaran sepanjang hayat, dibutuhkan pendorong dari para penggiat perpustakaan, karena dari karya merekalah diharapkan masyarakat hidup lebih kreatif, lebih inovatif, dan menjadi lebih produktif sehingga masyarakat dapat terentaskan dari kemiskinan.

Pada sisi lain, Najwa Shihab yang merupakan Duta Baca Indonesia, menyampaikan topik “Membaca dan Pembentukan Karakter” pada Seminar Ilmiah Nasional IPI yang diselenggarakan di Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta tersebut. Menurutnya, seorang pustakawan harus memiliki keahlian. Di antaranya, kemampuan berkomunikasi yang baik serta mengajak anak didiknya untuk mencari tahu sumber ilmu. Ini patut dikuasai seorang pustakawan di samping kemampuan mencari buku. Mantan pembawa acara “Mata Najwa” ini berpesan

agar kemampuan menemukan informasi yang beragam di dunia maya harus menjadi keahlian dan dimiliki pustakawan saat ini.

Dari kegiatan Rakerpus XXI dan Seminar Ilmiah Nasional IPI ini, dia berharap terjadi distribusi pengetahuan antara pustakawan satu dengan yang lain. Terjadi berbagi pengalaman dan praksis terbaik untuk dilakukan di daerah masing-masing. Dikatakannya juga, untuk mewujudkan hal tersebut menjadi sebuah kebijakan, harus dibarengi sebuah gerakan atau aksi, misalnya, kebijakan yang



Najwa Shihab selaku Duta Baca Indonesia sekaligus Narasumber

ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, untuk setiap tanggal 17, gratis mengirim buku ke seluruh wilayah di Indonesia.

Selain itu, dalam pemilihan makalah terbaik atau Call for Papers, dua perwakilan dari D.I. Yogyakarta yaitu Sukirno (puswatakan Universitas Gadjah Mada) dan Heri Burachman, Hakim, serta Wiyarsih (pengurus daerah IPI D.I. Yogyakarta) terpilih untuk memberikan pemaparan di Seminar Ilmiah Nasional. Mereka terpilih bersama dengan pustakawan dari Universitas Indonesia Maryiah dan Kalarensi Naibaho.****

“PEMBANGUNAN ALTERNATIF
UNTUK ACEH BERSIH NARKOBA”

JAKARTA 11 OKTOBER 2017



Foto: Humas



PEMBANGUNAN ALTERNATIF UNTUK ACEH BERSIH NARKOBA

Oleh: M. Iqbal

Rabu (11/10/2017), Badan Narkotika Nasional (BNN) menyelenggarakan Seminar Nasional di Hotel Kartika Chandra Jakarta dengan tema “Pembangunan Alternatif untuk Aceh Bersih Narkoba,” yang dihadiri oleh 100 orang dari Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas).

Penyelenggaraan seminar ini bertujuan adalah untuk menyatukan dan menggerakkan K/L serta komponen masyarakat untuk menyusun program dan anggaran pembangunan alternatif, membangun kemitraan, jejaring kerja, dan sinergi lintas K/L serta komponen masyarakat dalam pembangunan alternatif, dan mengalihkan profesi penanam ganja dan masyarakat perdesaan serta merubah kawasan kultivasi ganja menjadi kawasan produktif.

Komjen Pol Drs. Budi Waseso selaku Kepala BNN bertindak sebagai pembicara kunci pada acara tersebut dengan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, SH, Gubernur Provinsi Aceh yang diwakili oleh Wakil Gubernur Ir. Nova Iriansyah, MT, Menteri Pertanian yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Lingkungan Ir. Mukti Sarjono, M.Sc dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diwakili oleh Inspektur Drs. Wasis Hendro Yogie, MM. Adapun materi yang diusung dalam acara tersebut sebagai berikut:

PEMBANGUNAN ALTERNATIF

Pembangunan alternatif (*alternative*

development) merupakan program yang digagas oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Program ini dirancang secara terintegrasi, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam mengatasi Narkotika langsung ke akar masalahnya melalui pendekatan sosial, ekonomi, ekologi, dan keamanan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Program pembangunan alternatif telah dilaksanakan di beberapa negara seperti Afghanistan, Bolivia, Colombia, Filipina, Jamaika, Lao PDR, Mexico, Myanmar, Peru, dan Thailand. Khusus untuk Thailand, Badan Pengawasan Narkotika setempat telah berhasil mengalihfungsikan lahan opium sejak 30 tahun yang lalu. Hal yang sama juga diupayakan *UNODC* untuk membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan akibat semakin luasnya penyebaran ladang ganja yang ditengarai memiliki nilai ekonomi tinggi.

Alih fungsi lahan kultivasi ganja ke produk alternatif lainnya masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran tentang pentingnya pembangunan alternatif sebagai salah satu upaya pendekatan dalam mengubah perilaku masyarakat untuk meninggalkan ganja agar beralih ke produk alternatif lainnya. Representasi dari program ini adalah Provinsi Aceh.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, pembangunan alternatif telah disusun dalam satu konsep yaitu *Grand Design Alternative Development (GDAD)* dalam tiga tahap kegiatan selama periode tahun 2016 hingga tahun 2018 yaitu:



Foto: Humas

- **Tahap Pertama:** membangun kepercayaan/*trust building* (2016-2018) dengan cakupan kegiatan mulai dari persiapan, penyusunan dan koordinasi di tingkat daerah, pemetaan, konsolidasi dan koordinasi, penyusunan program dan anggaran, hingga perbaikan infrastruktur;
- **Tahap Kedua:** tahap implementasi (2019-2024) mencakup penyehatan masyarakat, pendidikan karakter, pelatihan, pembinaan dan bina dasar hukum, pembinaan dalam pengolahan dan pengelolaan serta kewirausahaan, pembinaan dalam pengemasan dan pemasaran, pembangunan kemitraan dan sinergi, serta peningkatan dukungan permodalan dan akses pasar berikut koperasi; dan
- **Tahap Ketiga:** tahap pengembangan agrowisata (mulai 2025) berikut pengembangan wilayah untuk meningkatkan sektor wisata dan edukasi desa serta monitoring dan evaluasi *GDAD* tahun 2025 serta penyusunan *GDAD* tahap kedua (2026-2030).

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo, SH menilai bahwa faktor penyebab bertumbuhnya Narkoba di Indonesia adalah karena keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Untuk itu, Kementeriannya telah memiliki dasar kebijakan terkait dengan hal tersebut, yaitu Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Menurut Mendagri, pambangunan alternatif dipandang strategis dalam membantu penanggulangan Narkoba sesuai dengan misi utama yaitu terciptanya keamanan dan keadilan bagi semua dengan membuat dunia aman dari segala bentuk kejahatan. Selain itu, juga dipandang strategis dalam mencegah angka peredaran gelap Narkoba melalui pengalihan profesi para bandar dengan konsep pemberdayaan serta strategis dalam mendukung program alih profesi petani penanam ganja dengan kegiatan sosialisasi informasi dan peningkatan keterampilan.

Adapun areal kultivasi ganja hampir terdapat pada hampir semua kabupaten di Provinsi

Aceh. Hal tersebut dinyatakan oleh Wakil Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT. Potensi pembangunan alternatif di provinsi ini dapat diimplementasikan melalui pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Sedangkan Staf Ahli Bidang Lingkungan Kementerian Pertanian Ir. Mukti Sarjono, M.Sc berpendapat bahwa permasalahan dan tantangan di lapangan adalah perlunya pembinaan kepada masyarakat oleh instansi teknis terkait dengan adanya sebagian masyarakat yang kembali menanam ganja karena disebabkan oleh beberapa faktor.

Adapun Dukungan Kementerian Pertanian dalam *GDAD* yaitu menyusun program dan anggaran, menentukan jenis tanaman alternatif pengganti ganja, membangun kemitraan dan jejaring kerja serta sinergi lintas K/L beserta komponen masyarakat, dan mengimplementasikan *GDAD* secara bertahap dan berkelanjutan.

Dari kacamata Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung pembangunan alternatif adalah berpijak pada reformasi koperasi melalui kewirausahaan. komponennya yang meliputi antara lain pendampingan prakoperasi, fasilitasi sertifikasi merek dagang, paten, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, perkoperasian, teknis kejuruan (*vocational*), manajerial serta pelatihan untuk pelatih (*training of trainer/ToT*).

Dalam jangka panjang, arah kebijakan *GDAD* diharapkan dapat mengubah situasi darurat Narkoba saat ini, terutama bila melihat kondisi gambaran produksi ganja di Provinsi Aceh yang kian tak terkendali. Sebelumnya, tanaman ganja banyak terdapat di Kabupaten Gayo Luwes.

Akan tetapi, belakangan tanaman tersebut menyebar di beberapa kabupaten lainnya seperti Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Nagan Raya, dan Pidie. Hal tersebut karena adanya permintaan, mengingat ganja Aceh tergolong bermutu tinggi di dunia.

Melalui *GDAD* diharapkan produksi ganja menurun, jaringan peredaran gelap ganja terungkap dan terputus, serta karakter masyarakat terbangun melalui pola hidup sehat, sadar hukum, terbina, terampil, maju, mandiri, dan memiliki usaha dari hulu (penanaman) hingga hilir (pemasaran) dengan beragam keterampilan (pertanian dan nonpertanian) yang dapat mengangkat harkat dan citra Aceh dan Indonesia. Hal yang lebih penting lagi adalah agar citra dan stigma Aceh sebagai wilayah sentra produksi ganja dapat dihilangkan. ****



Peningkatan pemakaian internet tersebut membuktikan masyarakat masa kini melakukan komunikasi dan interaksi sosialnya pada sebuah wadah bernama media sosial. Pada 2016 ini di Indonesia internet paling banyak digunakan oleh usia 35–44, yang kedua adalah usia 25–34, dan yang ketiga adalah 10–24 tahun. Hal ini membuktikan bahwa usia remaja 10–24 tahun ikut marak menggunakan internet. Pada usia–usia tersebut memiliki teman banyak adalah kebutuhan dan kesenangan tersendiri.

Selain itu, banyak dampak yang terjadi dari pemakaian sosial media bagi remaja. Tidak hanya berdampak positif melainkan banyak hal-hal negatif yang dialami oleh remaja. *cyberbullying* merupakan salah satu dampak negatif yang saat ini menghampiri para remaja (Maulanz H, 2016).

Kegiatan *cyberbullying* yang saat ini sedang marak dengan korban anak–anak di bawah usia 18 tahun. Karena mayoritas dari penggunaan internet pada media sosial saat ini adalah anak–anak berusia 18 tahun ke bawah.

Pada Januari 2017 ditemukan kasus *cyberbullying* terjadi pada Seorang mahasiswi di Kota Bandung yang dianiaya oleh teman-temannya sendiri. Penganiayaannya merupakan buntut dari saling *bully* antara korban dan pelaku di media sosial. Pelaku yang tidak terima dibully, lalu menganiaya korban.

Kasus seperti ini kian marak terjadi. Penggunaan internet yang di luar batas dan tak teratur menyebabkan kegiatan *cyberbullying* terus terjadi. Salah satu akun media sosial yang terhubung dengan koneksi internet dan sedang

digandrungi remaja saat ini adalah Instagram.

Menurut Kompas.com berdasarkan hasil survei dari lembaga donasi anti–*bullying*, Ditch The Label, Instagram menjadi media sosial paling umum digunakan untuk melakukan perisakan atau perundungan di internet, alias *cyberbullying*.

Tak kurang dari 10.000 remaja berusia 12 hingga 20 tahun yang berdomisili di Inggris dijadikan sebagai sumber survei. Hasil survei menunjukkan, lebih dari 42 persen korban *cyberbullying* mengaku mendapatkannya di Instagram, sebagaimana dilaporkan Mashable dan dihimpun KompasTekno, Jumat (21/7/2017).

Cyberbullying memberikan dampak yang luar biasa pada keadaan mental seseorang. Mulai dari dampak kecil sampai dengan dampak besar. Mulai dari menjadi ikut melakukan kegiatan *cyberbullying* sakit jantung, penurunan prestasi korban maupun pelaku *bullying*, perilaku agresif, sampai dengan dampak yang teburuk yaitu bunuh diri.

Oleh karena itu, untuk menanggulangnya, para orang tua sebaiknya melakukan pencegahan sejak dini seperti selalu mengawasi pada setiap pemakaian sosial media, membatasi kegiatan dalam bersosial media serta daya dukungan dari setiap lembaga sosial seperti sekolah universitas untuk melakukan gerakan–gerakan literasi terhadap sosial media dan sadar serta mematuhi UU tentang *Cyberbullying* yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI yang berisi tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, khususnya pada Pasal 310 ayat (1) dan (2).****(Dikutip dari kompas.com)

WASPADA!!!! PREDATOR MEDIA SOSIAL INCAR REMAJA DAN ANAK-ANAK

Oleh: Rohman Gumilar

Hampir setiap hari kita selalu mendengar dan melihat banyak anak-anak bergelimpangan tanpa dosa menjadi korban kebiadaban para predator yang sulit dimengerti, karena sama sekali tidak ada rasa perikemanusiaan, bahkan nyaris seperti hewan belaka.

Beberapa waktu silam kita diingatkan oleh kasus bocah berinisial PNF yang ditemukan dalam kardus dan mulutnya disumpal oleh celana, lalu kasus Jamal (10) yang diculik dan sudah ditemukan tewas di sekitar Lubang buaya, di Wonogiri, seorang anak berusia 9 tahun ditemukan tewas dikolong jembatan akibat korban sodomi dan masih segar dalam ingatan kita pada kasus Angelin, kasus Emon dan lebih parah lagi pelecehan seksual itu dilakukan oleh seorang guru ngaji seperti halnya kasus yang terjadi di Cicendo, Bandung, Jawa Barat sejumlah 14 anak menjadi korban kejahatan seksualnya.

Begitu banyak kasus yang mencuat setelah lahirnya kecanggihan teknologi yang bernama Internet, banyak pelaku yang terinspirasi dari tayangan konten-konten porno di media sosial dan usaha pemerintah dalam menangani hal ini belum bisa terrelisasikan secara maksimal dalam pemblokiran situs-situs yang berbau porno, dan masyarakat yang tidak bisa memfilter dalam penggunaan media sosial selalu menjadi korban para pelaku kejahatan yang memengaruhi melalui tayangan, kekerasan maupun pornografi.

Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) mencatat berbagai kejahatan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2013 saja terjadi 2.700 kasus, 2014 sebanyak 3.339, tahun 2015 terjadi 1.726 kasus dengan 58% berupa kejahatan seksual, bahkan lembaga yang dianggap nyamanpun tidak luput dari ancaman pelaku kejahatan seksual, seperti Sekolah terutama Sekolah Dasar (SD) bahkan TK atau PAUD menjadi incaran pelaku.

Kepolosan anak dijadikan kesempatan berharga buat mereka hingga beberapa kasus lamban tertangani dikarenakan kasusnya muncul setelah bertahun-tahun dan baru terungkap, kasus yang dilakukan para predator kadang di luar nalar kita. Banyak hal aneh dilakukan, bisa jadi

disebabkan oleh pengaruh kecanggihan teknologi serta minimnya pengetahuan dan pengawasan dari orangtua.

Berbagai solusi untuk menghentikan aksi para predator ini telah direncanakan bersama Menteri Sosial beberapa waktu yang lalu, misalnya dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku yaitu berupa sanksi sosial contohnya menyebar foto pelaku di *public area* dan hukuman kebiri sementara ataupun permanen disamping hukum pidana. Namun sejauh ini belum menunjukkan perubahan yang berarti.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan ini diantaranya pola asuh orangtua yang masih salah, orientasi pendidikan akademik yang selalu menjadi nomor satu, orang tua yang belum mampu mengikuti perkembangan zaman serta cara asuh yang mereka pakai adalah *copy paste* dari pola asuh orangtua terdahulu tanpa mengamati kemajuan zaman. Sekitar 60% orangtua di Indonesia hanya menanyakan persoalan pendidikan pada anaknya seperti nilai dan peringkat sekolah, sebagian kecil (30%) saja yang menanyakan masalah sosial, hobby dan yang lainnya.

Langkah utama kita dalam menghadapi hal ini adalah memperkuat pendidikan karakter, moral dan agama yang selama ini hanya bersifat hafalan (kognitif) dan bukan amalan. Perkuatlah fungsi guru di sekolah agar dapat menjadi motivator dan tauladan bagi siswanya disamping kewajibannya sebagai pendidik. Setidaknya sekolah memiliki *management control* bagi siswanya melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Tidak boleh terlewat untuk memberi perhatian yang maksimal dari orangtua, Memanjakan dengan hal yang kurang tepat akan berakibat yang kurang baik terhadap anak. Berikan pengawasan terhadap penggunaan media sosial kepada anak, jangan biarkan anak menjadi korban media sosial.

Kesemuanya ini tentu saja memerlukan peran pemerintah yang diharapkan dapat memberikan upaya dan tindakan kepada pelaku kejahatan anak, paling tidak mempersempit ruang gerak mereka.****

FENOMENA “TERNAK AKUN” PALSU

Oleh: Yayat Ruhiat

Media sosial (Medsos) menurut para ahli komunikasi adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual (*Model Komunikasi: McGraw Hill Dictionary*)

Di era millennial sekarang ini, Medsos sudah banyak beralih fungsi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan, mati 1 tumbuh 1.000. Banyak individu ataupun organisasi yang menyalahgunakan fungsi dari medsos. Salah satunya adalah sebagai media untuk “beternak akun” yang sudah pasti palsu.

Apa sih “ternak akun” itu? “Ternak Akun” kebanyakan dipergunakan untuk tujuan yang tidak baik. Namun demikian, banyak juga pihak-pihak yang menggunakannya di jalur yang benar. Dengan maraknya kejahatan di dunia maya, marak juga “ternak-ternak akun” di Medsos. Berikut 5 motif “beternak akun” palsu di Medsos:

1. Motif Kampanye Politik

Para politikus saat ini banyak menggunakan akun medsos sebagai media untuk menyampaikan visi dan misinya. Ketika kita melihat jumlah *followers* si politikus tersebut mencapai ribuan, jangan kagum dulu. Bisa jadi *followers*nya adalah robot atau akun palsu yang sengaja diarahkan untuk mengikuti akun si politikus tersebut agar terlihat banyak *fans* atau pengikutnya sehingga dinilai layak untuk dipercaya.

2. Motif Kepentingan bisnis

Dunia bisnis juga gencar dengan promosi di berbagai media sosial. Saat ini banyak produk yang memiliki akun Medsos resmi dan memiliki banyak *followers* yang pastinya sudah diarahkan untuk memuji dan berkomentar yang positif tentang produk tersebut dengan tujuan untuk menarik minat pembeli. Untuk kasus seperti ini, akun palsu berubah menjadi akun multi fungsi, maksudnya akun dapat dijadikan media promosi berbentuk link afiliasi, link tersembunyi yang dipendekkan, promosi website atau blog (situs) dan lain sebagainya.

3. Motif Penggiringan opini publik

Jenis akun ini biasanya di buat oleh organisasi atau individu yang memiliki kepentingan tertentu. Akun palsu seperti ini bangkit di masa-masa kritis atau masa dimana dunia perpolitikan sedang greget-gregetnya. Bahkan Tak sedikit akun palsu jenis ini yang memuat informasi secara kontinyu berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

4. Motif Memantau Aktivitas Orang Lain atau Kelompok Tertentu

Akun ini biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan memantau aktivitas seseorang atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang objek yang sedang dipantau guna memperoleh informasi atau data-data yang dibutuhkan. Bisa juga dimanfaatkan oleh para penyidik untuk menangkap pelaku kejahatan *cyber*.

5. Motif Kesenangan

Jenis akun ini di buat oleh para pelaku untuk kepuasan diri secara pribadi misalnya untuk pelampiasan emosi atau amarah, kesenangan, kejahilhan dan sebagainya.

Adapun tips untuk mengetahui “ternak akun” atau akun palsu tersebut yaitu:

1. Perhatikan foto yang terdapat pada akun tersebut. Biasanya akun palsu tidak memiliki foto bersama teman atau keluarga.
2. Perhatikan status pada beranda. Akun palsu tidak memiliki percakapan dengan teman-temannya. *Comment* yang terdapat pada status, umumnya berasal dari orang yang tidak dikenal.
3. Satu orang atau satu kelompok tertentu bisa memiliki banyak akun dan umumnya mereka saling berteman. Respon mereka pun lambat dalam membalas pesan atau jenis komunikasi lainnya.
4. Akun palsu lebih agresif dalam *comment* maupun pada status di berandanya.

Tingkatkan kewaspadaan dalam bersosial media agar anda terhindar dari berbagai modus penipuan yang semakin beragam. ****

RESEP PATTY BURGER

Oleh: Desi

Hamburger (atau seringkali disebut dengan burger) adalah sejenis makanan berupa roti berbentuk bundar yang diiris dua dan ditengahnya diisi dengan patty yang biasanya diambil dari daging, kemudian sayur-sayuran berupa selada, tomat dan bawang bombay. Sebagai sausnya, burger diberi berbagai jenis saus seperti mayones, saus tomat dan sambal serta mustard. Beberapa varian burger juga dilengkapi dengan keju, asinan, serta bahan pelengkap lain seperti sosis dan ham.

Burger dapat menjadi fast food andalan saat lapar melanda. Anda dapat membuatnya sendiri di rumah, lengkap dengan isian home made yang lezat. Resep Beef Patty mudah lezat berikut ini dapat Anda praktekan untuk membuat stok isian burger di rumah.

Bahan:

- 1 kg daging cincang (minced beef)
- 1 butir telur
- 150 g tepung roti
- 3 sendok teh beef base (penyedap rasa daging)
- 150 g bawang bombay cincang halus



Gambar oleh : Google

Cara Membuat:

Campur semua bahan beef patty menjadi satu hingga rata.
Lalu cetak atau dibentuk pipih sesuai selera.
Simpan dalam freezer.
Saat akan membuat burger, pindahkan daging dari freezer ke chiller.
Setelah lunak, panggang selama 20 menit dengan suhu 150 C
Sajikan dengan roti burger dan pelengkap.
Mudah bukan membuatnya?

Selamat mencoba...



Gambar oleh : Google

Sesjen Wantannas melantik Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kedepuitan Setjen Wantannas, Kamis (12/10/2017)



Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM dan Brigjen TNI Isaac Marcus P dalam Acara Forum Tematik Bakohumas, Rabu (18/10/2017)

Pelantikan Pejabat Eselon II di lingkungan Kedepuitan Setjen Wantannas, Selasa (26/09/2017)



SOEMPAH PEMOEDA



SOEMPAH PEMOEDA

Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakoe,
bertoempah darah jang satoe, Tanah Air Indonesia

Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakoe,
berbangsa satoe, Bangsa Indonesia

Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakoe,
Berbahasa satoe, Bahasa Indonesia